

# LAPORAN KINERJA

**SEKRETARIAT  
DITJEN KEBUDAYAAN**

**2020**





# KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2020 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020.

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2020 menetapkan empat sasaran kegiatan dan tujuh indikator kinerja kegiatan. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2020. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2020.

Jakarta, 29 Januari 2021

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan,



*Fitra Arda*  
Fitra Arda



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	v
<b>I. PENDAHULUAN</b>	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	2
D. Isu-isu Strategis	3
<b>II. PERENCANAAN KINERJA</b>	5
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	8
A. Capaian Kinerja	8
B. Realisasi Anggaran	25
<b>IV. PENUTUP</b>	29
<b>LAMPIRAN</b>	32





# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan 2020 menyajikan tingkat pencapaian empat sasaran kegiatan dengan tujuh indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Tingkat ketercapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III.

Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

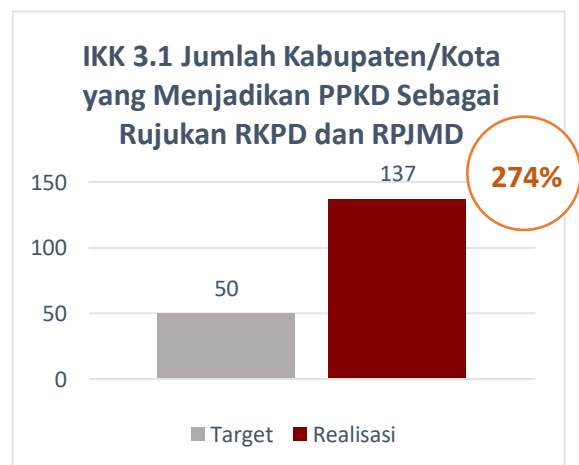
## SK 1. Meningkatnya Partisipasi Pemerintah Daerah pada Pekan Kebudayaan



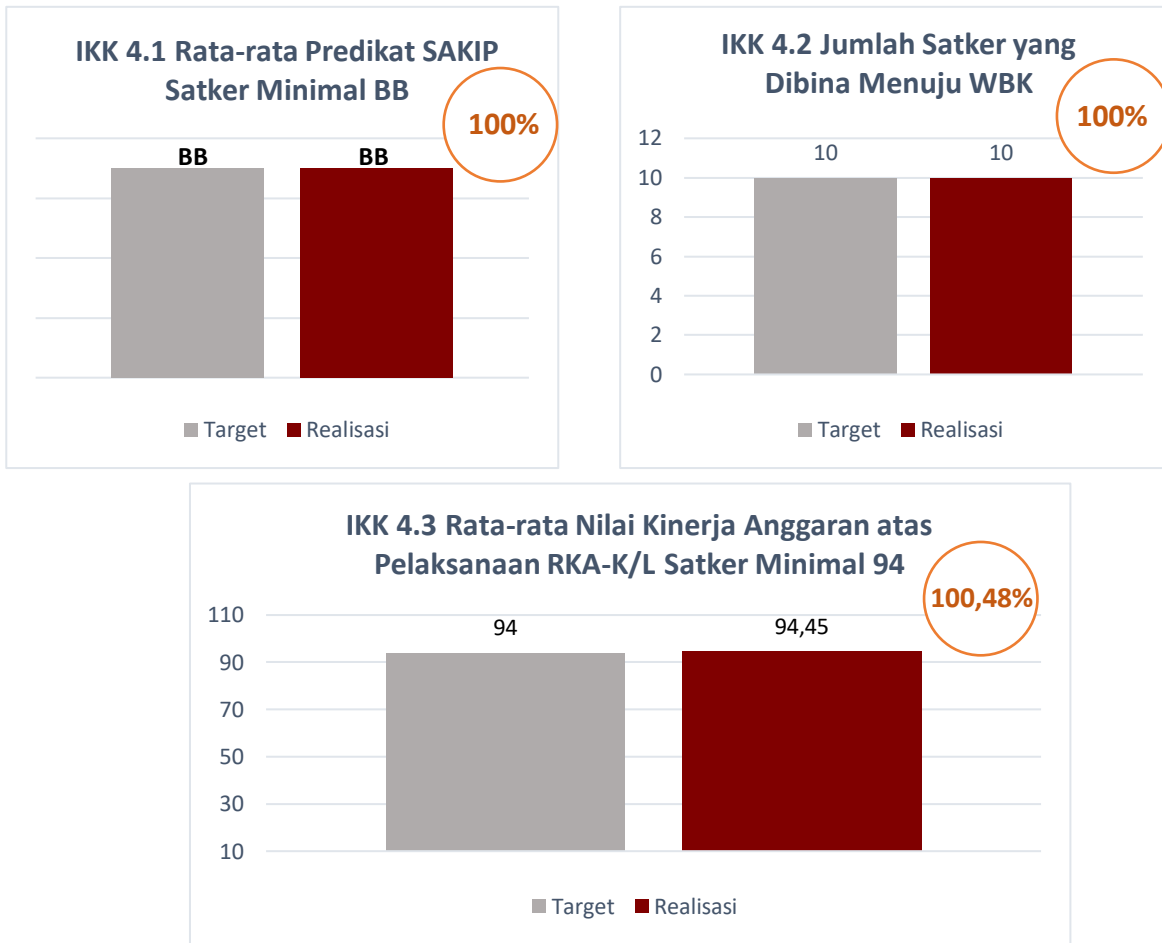
## SK 2. Meningkatnya Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyusun dan Memperbarui PPKD Kebudayaan



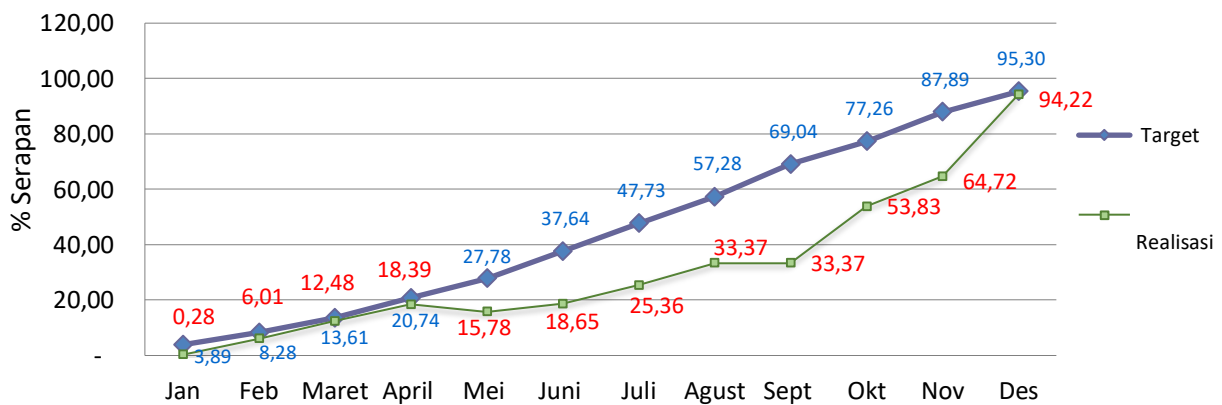
## SK 3. Meningkatnya Jumlah Kabupaten/Kota yang Menjadikan PPKD Sebagai Rujukan RKPD dan RPJMD



#### SK 4. Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Kebudayaan



**GRAFIK TARGET DAN REALISASI APBN 2020**  
 Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan  
 Per Tanggal 31 Desember 2020



Bulan	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Target	3,89	8,28	13,61	20,74	27,78	37,64	47,73	57,28	69,04	77,26	87,89	95,30
Realisasi	0,28	6,01	12,48	18,39	15,78	18,65	25,36	33,37	33,37	53,83	64,72	94,22



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Pada tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur pada empat satker pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Konsekuensi dari perubahan nomenklatur tersebut salah satunya adalah Revisi DIPA tahun 2020 dimana DIPA untuk satker baru disahkan pada tanggal 04 Mei 2020;
2. Pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan beberapa kegiatan budaya terhambat karena kebijakan pembatasan kegiatan di pusat maupun daerah dan dari awal Maret s.d Juni 2020 terdapat pembatasan penerimaan SPM sehingga memperlambat pencairan anggaran.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Percepatan revisi anggaran untuk menyesuaikan kondisi kegiatan di tengah pandemi covid-19.
2. Perubahan format beberapa kegiatan yang semula direncanakan akan diadakan secara luring menjadi daring (*online*) atau kombinasi luring dan daring.
3. Percepatan mekanisme kerja menyesuaikan dengan nomenklatur dan struktur organisasi baru.
4. Melaksanakan kegiatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

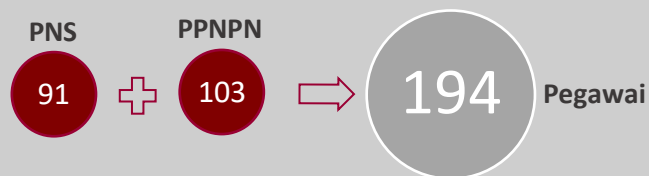


# BAB I. PENDAHULUAN



## A. GAMBARAN UMUM

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan merupakan satuan kerja yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sejak November 2020 hingga saat ini, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dipimpin oleh Fitra Arda. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan wilayah kerja sebanyak 39 satuan kerja/upt di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.



## B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud.

9. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.



### **C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



#### **TUGAS POKOK**

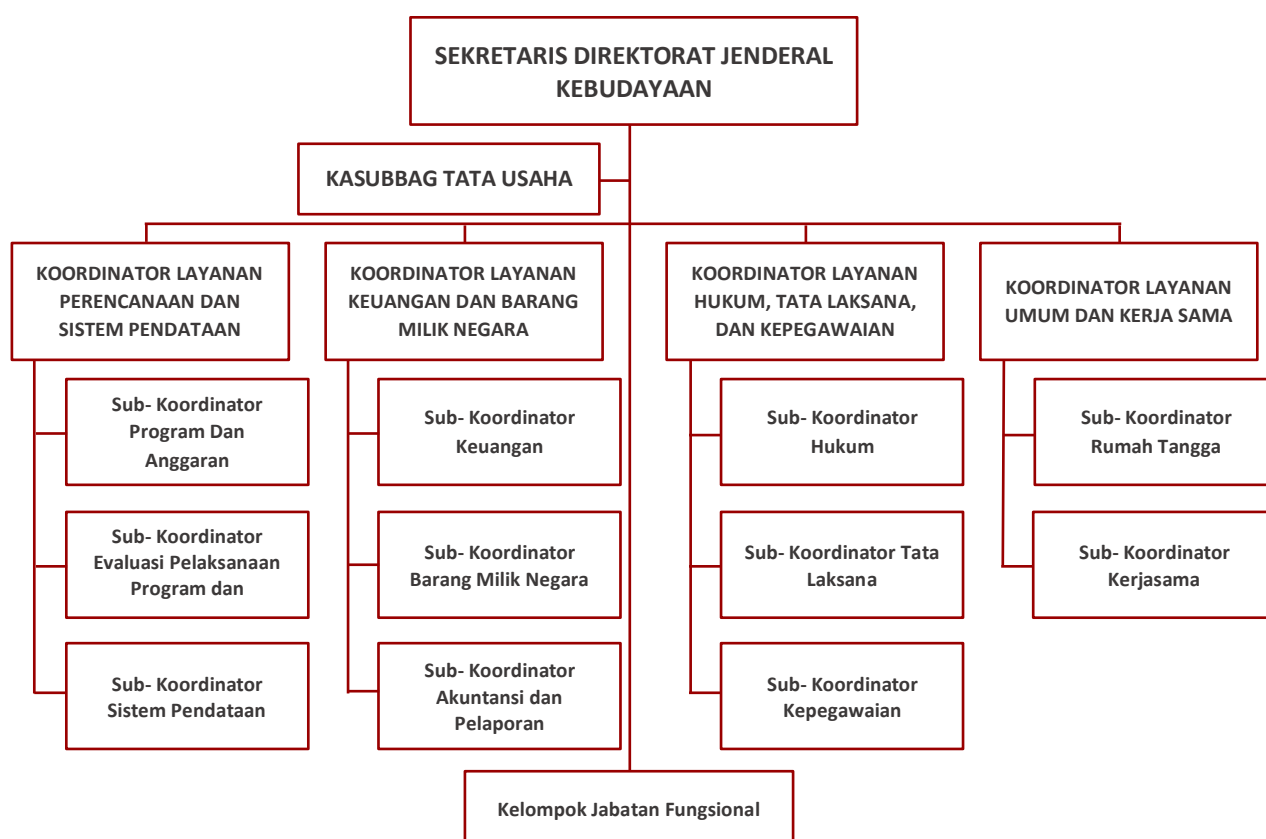
Melaksanakan pelayanan administratif dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan serta ketatausahaan Direktorat Jenderal Kebudayaan.



#### **FUNGSI**

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengelolaan kebudayaan;</li><li>b. Pengelolaan data dan informasi di bidang pengelolaan kebudayaan;</li><li>c. Pengelolaan dan pengembangan sistem pendataan kebudayaan;</li><li>d. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengelolaan kebudayaan;</li><li>e. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal;</li><li>f. Penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>g. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;</li><li>h. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;</li><li>i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pengelolaan kebudayaan; dan</li><li>j. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;</li><li>k. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengelolaan kebudayaan; dan</li><li>l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.</li></ol> |
|---|--|

## STRUKTUR ORGANISASI



### D. ISU-ISU STRATEGIS

Beberapa permasalahan/isu strategis di Sekretariat Ditjen Kebudayaan yang menjadi perhatian antara lain:

1. Belum maksimalnya manajemen tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan
2. Belum ada SOP pengelolaan data di satuan kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan
3. Belum optimalnya koordinasi antara pusat, daerah, dan Kementerian terkait

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/isu strategis yang dihadapi antara lain:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan perbaikan dan memperkuat data koleksi, pengelolaan database di Unit Pelaksana Teknis, dan tata kelola pendataan dan penetapan WBTB.
2. Melakukan penyusunan SOP kegiatan pengelolaan data.
3. Penguatan peran UPT dalam koordinasi antara pusat dan daerah



# BAB II. PERENCANAAN KINERJA



## A. VISI, MISI DAN TUJUAN STRATEGIS

### **Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024**

---

---



Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

### **Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan**

---

---



Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Untuk itu, misi Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.



## B. PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan target tahunan yang akan dicapai melalui perjanjian kinerja tahun 2020. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Awal	Target Revisi	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
					<i>(dalam ribuan rupiah)</i>	
1	Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan	1.1 Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah	20 event	-	481.320.458	415.614.189
		1.2 Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional	20 pemda	-		
2	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD	2.1 Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD	50 Kab/kota	-	481.320.458	415.614.189
3	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RPJMD	3.1 Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RPJMD	50 Kab/kota	-		
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	4.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat BB	-		
		4.2 Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	10 satker	-		
		4.3 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	Nilai 94	-		





# BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA



## A. CAPAIAN KINERJA

Sasaran Kinerja (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada laporan kinerja Setditjen kebudayaan tahun 2020 mengacu pada Renstra tahun 2020 – 2024 di mana target SK maupun IKK pada renstra tahun 2020 – 2024 berbeda dengan target SK dan IKK pada renstra periode sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan capaian SK dan IKK pada laporan kinerja tahun 2020 ini tidak dapat dibandingkan dengan target SK maupun IKK tahun sebelumnya. Sesuai perjanjian kinerja tahun 2020, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan empat sasaran kegiatan dengan tujuh indikator kinerja kegiatan. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2020.

### SK 1. Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan

Pencapaian keberhasilan dari Sasaran kegiatan “Meningkatnya Partisipasi Pemerintah Daerah pada Pekan Kebudayaan” ini didukung oleh dua indikator kinerja kegiatan, yaitu:

1. Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah
2. Jumlah Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional

Ketercapaian atas indikator kinerja kegiatan ini dijelaskan sebagai berikut:

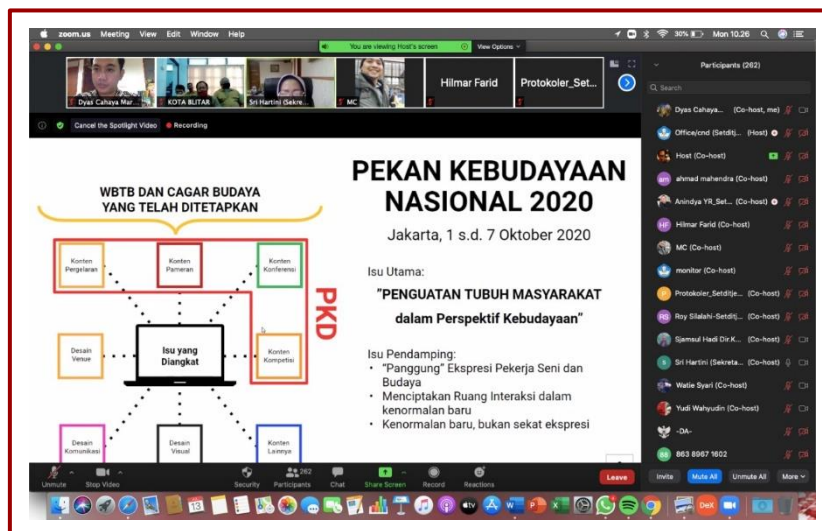
#### IKK 1.1 Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
20 event	61 event	305 %	20 event

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai berikut:

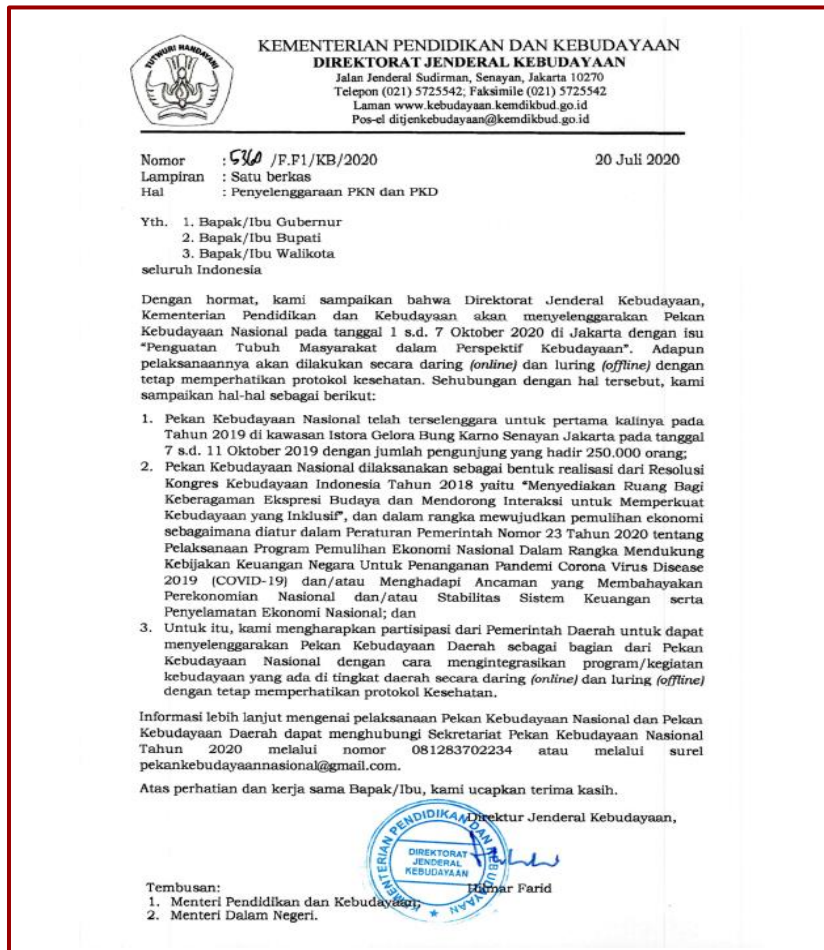
a. Sosialisasi Pekan Kebudayaan Nasional dan Pekan Kebudayaan Daerah 2020

Sosialisasi ini dilaksanakan pada 13 Juli 2020 dengan mengundang seluruh Kepala Dinas yang membidangi kebudayaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta seluruh kepala Taman Budaya. Agenda pada sosialisasi ini adalah untuk menyampaikan mekanisme pelaksanaan PKN dan PKD. Untuk materi Sosialisasi PKN-PKD dapat diunduh melalui tautan berikut: <https://s.id/pkn2020>



b. Surat Edaran Dirjen Kebudayaan tentang PKN dan PKD

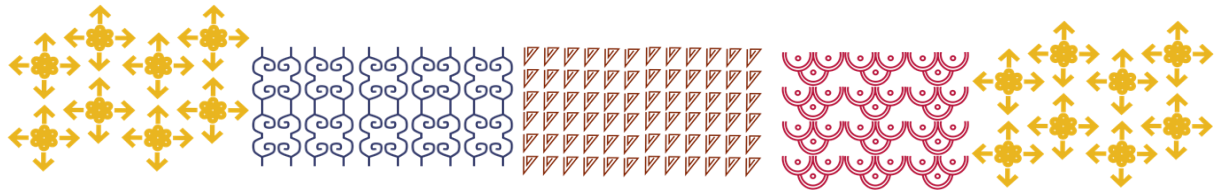
Surat Edaran ini diberikan kepada seluruh kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) terkait Permohonan Penyelenggaraan PKD dan Partisipasi dalam PKN dengan tetap mengikuti protokol kesehatan



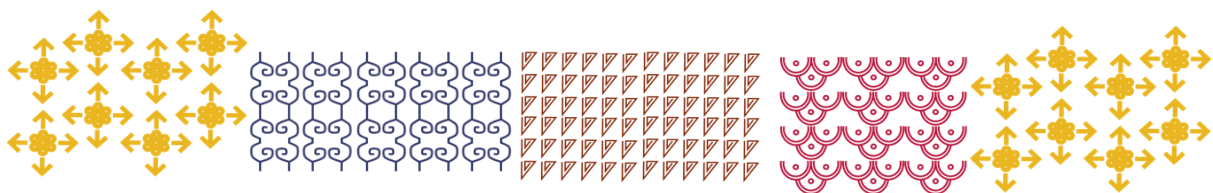
## IKK 1.2 Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional

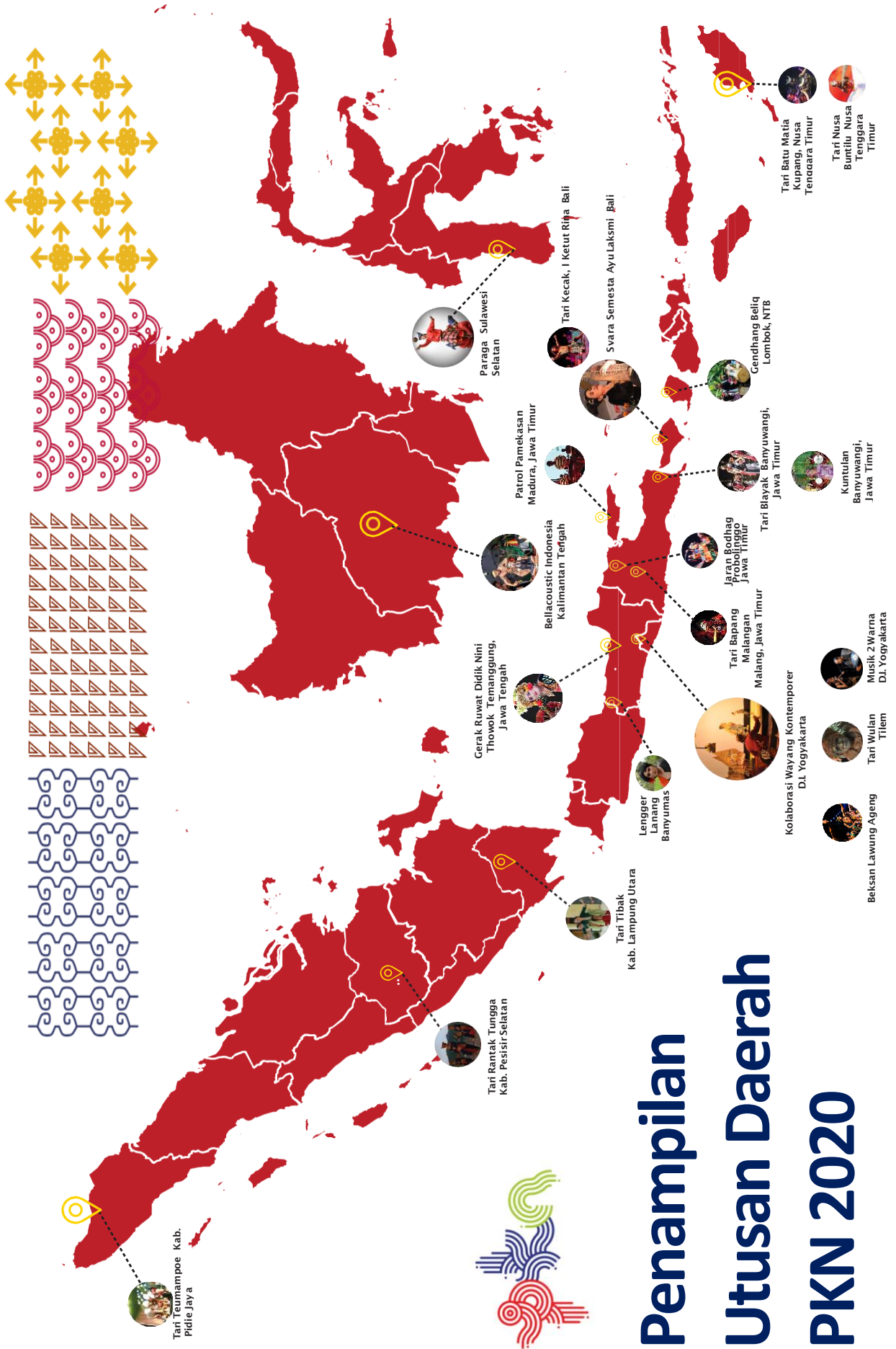
Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
20 pemda	32 pemda	160%	20 pemda

Pada tahun 2020 Pekan Kebudayaan Nasional dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober hingga 30 November 2020 secara daring atau *online* dengan tema "*Cultural Resilience*". Inti dari tema ini adalah kebudayaan yang di dalamnya terdapat pengetahuan tradisional, kesenian, dan ragam ekspresi budaya lainnya. Pekan Kebudayaan Nasional ini disiarkan secara langsung melalui laman pkn.id dan saluran televisi nasional TVRI dengan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

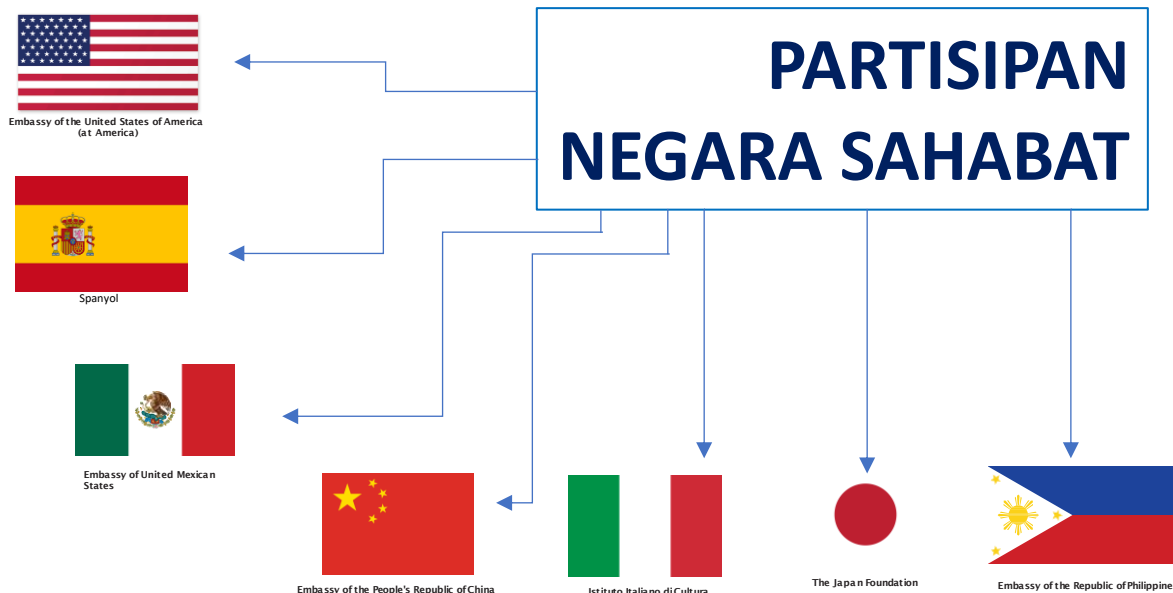


# Pekan Kebudayaan Nasional





# Penampilan Utusan Daerah PKN 2020



## PROFIL PENGUNJUNG LAMAN PKN.ID

### PKN.ID

Total halaman yang dikunjungi

**147.752 kali**

Total pengunjung (*visitor*)

**54.933 orang**

Rata-rata pengunjung

**2.062**

**orang/hari**

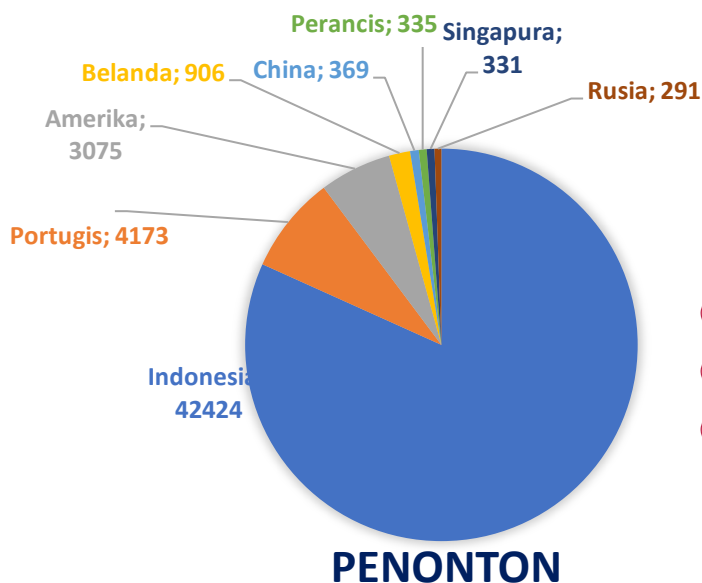
tertinggi saat Pembukaan PKN  
(9.512 pengunjung)

Jenis kelamin

**Laki-laki (54,15%),  
Perempuan (45,85%)**

Usia

**18-24 th (27,5%);  
25-34 th (33,5%);  
35-44 (15,5%);  
45+ (23,5%)**



### Sebaran geografis

Selama periode PKN diakses hingga 128 negara. Selain Indonesia, negara yang cukup besar mengakses pkn.id adalah Portugis, Amerika, Belanda, Tiongkok dan Perancis, dll.

(sumber Google Analytic laman pkn.id periode 31 Okt- 1 Des 2020)



## **SK 2. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD**

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (selanjutnya disebut PPKD) adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya (Pasal 1 UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota berisi:

- Identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
- Identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
- Identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota;
- Identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
- Analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

Sebagai salah satu amanah UU Pemajuan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 melakukan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tingkat Kabupaten dan Provinsi. Sampai dengan akhir tahun 2020, sebanyak 391 Kabupaten/Kota dan 34 provinsi telah menyampaikan PPKD kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan. Penyusunan PPKD tersebut merupakan langkah awal dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan yang merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki tata kelola bidang kebudayaan yang lebih efektif.

Pencapaian keberhasilan dari Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyusun dan Memperbarui PPKD" ini didukung oleh satu indikator kinerja kegiatan, yaitu "Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyusun dan Memperbarui PPKD". Ketercapaian atas indikator kinerja kegiatan ini dijelaskan sebagai berikut:

### **IKK 2.1 Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD**

<b>Tahun 2020</b>			<b>Target Akhir Renstra 2024</b>
<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	
<b>50 kab/kota</b>	<b>34 kab/kota</b>	<b>68 %</b>	<b>10 kab/kota</b>



Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020 keberhasilan Sekretariat Ditjen Kebudayaan dalam mencapai target IKK “Jumlah Kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD” sebesar 68% atau sebanyak 34 kabupaten/kota. Angka ini menunjukkan capaian kinerja Sekretariat Ditjen Kebudayaan pada IKK ini belum mencapai target yang ditetapkan.

Beberapa kegiatan yang menunjang penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilaksanakan di tahun 2020, diantaranya:

No	Kegiatan	Keterangan
1	Pendampingan Penyusunan PPKD	Daring dan Luring
2	Pembuatan Video dan Artikel <i>Best Practice</i> /Praktik Baik PPKD	3 Video Best Practice PPKD dan Artikel Tulisan
3	Penyempurnaan Laman PPKD (APIK)	APIK 2.0 (ppkd.kemdikbud.go.id)

#### a. Pendampingan Penyusunan PPKD

Tahun 2020, asistensi pendampingan penyusunan PPKD secara simultan terus dilakukan terhadap Kabupaten/Kota yang belum menyusun PPKD. Pendampingan tersebut dilakukan secara luring maupun daring, mengingat tahun 2020 pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Akibat adanya pandemi COVID-19, beberapa daerah mengalami pengurangan anggaran untuk menanggulangi pandemi, sehingga mengakibatkan keterbatasan anggaran dalam penyusunan PPKD.

#### b. Pembuatan Video dan Artikel *Best Practice*/Praktik Baik PPKD

Selain melakukan asistensi, dalam rangka mendorong penyusunan PPKD, Ditjen Kebudayaan juga membuat dokumentasi dan publikasi terhadap dokumen PPKD yang telah disusun sebagai *best practice*/praktik baik, dengan harapan agar menjadi inspirasi bagi daerah lain yang belum menyusun untuk segera dapat menyusun PPKD sebagai dasar upaya pemajuan kebudayaan di wilayahnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dan tidak langsung. Beberapa Kabupaten/Kota yang dikunjungi diantaranya Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nagakeo, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Karimun, Kota Tegal, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Hasil dari pembuatan praktik baik tersebut berupa film dari tiga wilayah, yakni Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Nagakeo. Selain dalam bentuk film, praktik baik tersebut juga dinarasikan dalam sebuah tulisan artikel yang dimuat pada laman PPKD sebagai bahan informasi dan publikasi.

### c. Penyempurnaan Laman PPKD (APIK)

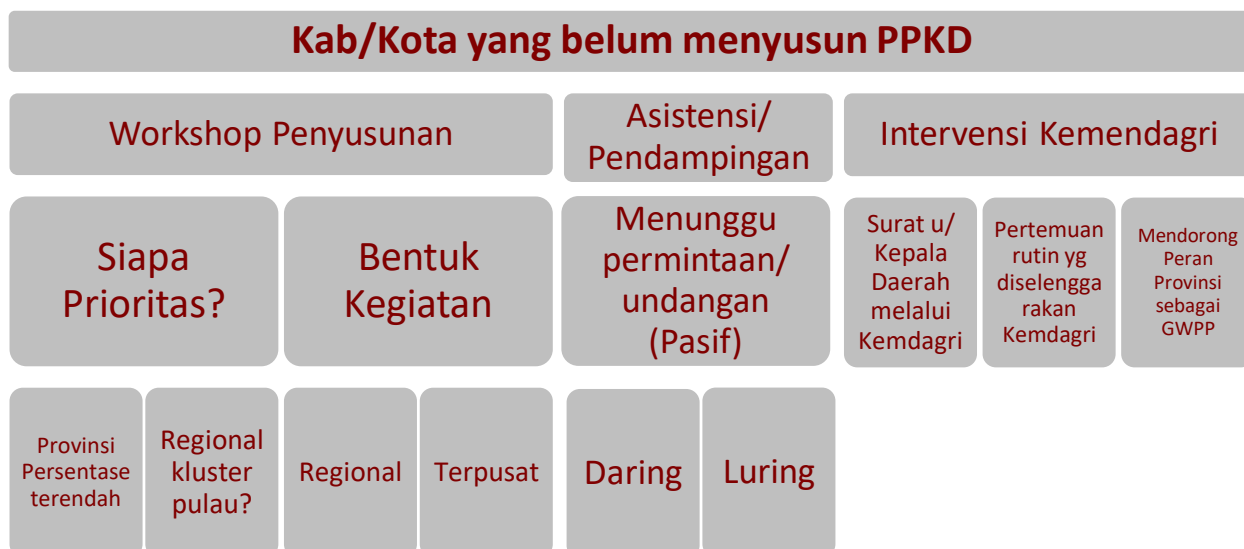
Penyempurnaan laman PPKD atau APIK (Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) dilakukan dengan tujuan sebagai platform untuk penyusunan dan penyempurnaan PPKD. Selain itu juga dilakukan untuk sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat mengenai PPKD. Selama ini laman mengenai PPKD ada dua, yakni [pemajuan.kebudayaan.kemdikbud.go.id](http://pemajuan.kebudayaan.kemdikbud.go.id) untuk input data bagi Dinas Kab/Kota dan Provinsi, sedangkan untuk publikasi Dokumen PPKD Kabupaten/Kota dan Provinsi diakses melalui laman [kongres.kebudayaan.id](http://kongres.kebudayaan.id). Melalui penyempurnaan ini, kedua hal tersebut dapat diakses melalui laman yang sama yakni [ppkd.kemdikbud.go.id](http://ppkd.kemdikbud.go.id).

Penyempurnaan laman ini juga mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dokumen PPKD serta sejauh mana daerah melakukan implementasi upaya Pemajuan Kebudayaan yang telah tertuang dalam rekomendasi di dokumen PPKD di masing-masing wilayah.

#### Permasalahan Utama PPKD

No	Kab/Kota yang Sudah Menyusun	Kab/Kota yang Belum Menyusun
1	Tidak Semua Memiliki Kelengkapan dan format Penulisan yang Sesuai Juknis	Keterbatasan anggaran di daerah untuk penyusunan PPKD
2	Data PPKD belum diinput dalam aplikasi PPKD (APIK)	Ketidakpedulian kepala daerah terhadap urusan kebudayaan di daerahnya
3	Tidak semua dokumen ditindaklanjuti dengan SK Penetapan oleh Kepala Daerah	Sulitnya mengumpulkan data objek pemajuan kebudayaan
4	Belum Adanya Analisis yang Mendalam mengenai Dokumen PPKD masing-masing Daerah	Pandemi Covid-19 anggaran PPKD dipotong atau pertemuan untuk penyusunan menjadi sulit
5	Belum adanya pemetaan Potensi dan Permasalahan Dokumen PPKD masing-masing Daerah	PPKD dianggap tidak dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi kemajuan daerah
6	Belum Terpetakannya bentuk implementasi dari tiap rekomendasi dalam dokumen PPKD	
7	Belum meratanya pemanfaatan dokumen PPKD, baik oleh Direktorat Teknis, Provinsi, maupun Kab/Kota	
8	Publikasi dan Sosialisasi Dokumen PPKD kepada OPD terkait, Masyarakat, Sektor Privat, BUMD, dan pemangku kepentingan terkait Rekomendasi PPKD belum sepenuhnya terlaksana secara komprehensif	
9	Belum adanya Permendikbud tentang Pemantauan dan Evaluasi PPKD	

## Rencana Tindak Lanjut PPKD



### **SK 3. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RPJMD**

Pencapaian keberhasilan dari Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Jumlah Kabupaten/Kota yang Menjadikan PPKD sebagai Rujukan RKPD dan RPJMD” ini didukung oleh satu indikator kinerja kegiatan, yaitu “Jumlah Kabupaten/Kota yang Menjadikan PPKD sebagai Rujukan RKPD dan RPJMD”. Ketercapaian atas indikator kinerja kegiatan ini dijelaskan sebagai berikut:

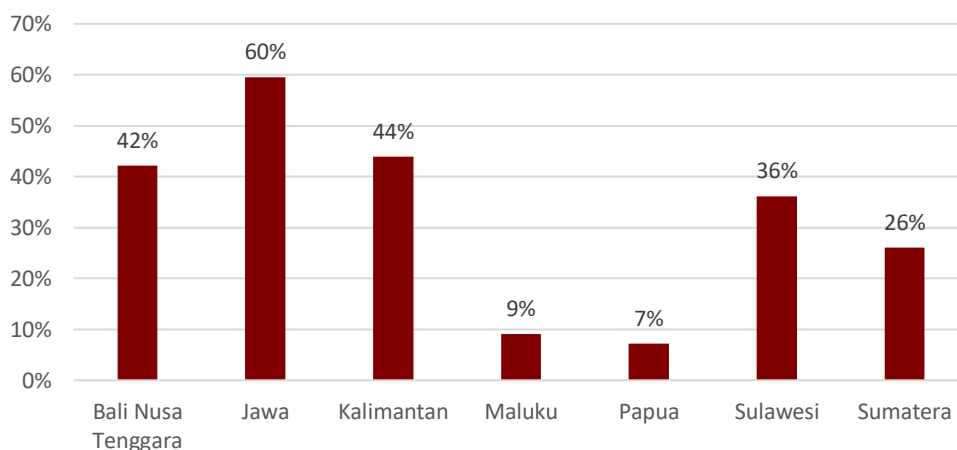
#### **IKK 3.1 Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RPJMD**

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
50 kab/kota	137 kab/kota	274%	10 kab/kota

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RPJMD telah melebihi target yang telah ditentukan. Capaian atas IKK ini mencapai 274% dari target atau sebanyak 137 kabupaten/kota sudah menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RPJMD. Beberapa daerah kabupaten/kota sudah mengimplementasikan PPKD ke dalam RKPD dan RPJMD. Pemantauan dan Evaluasi sebagai turunan Perpres No. 65 Tahun 2018 sedang disusun dan coba diselesaikan menjadi Permendikbud pada tahun 2021 sebagai dasar pemantauan dan evaluasi PPKD.

Uji Coba Borang Pemantauan dan Instrumen Evaluasi PPKD dilaksanakan dengan mengambil dua sample wilayah, yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat. Borang Pemantauan dan Instrumen Evaluasi PPKD ini merupakan lampiran dari rancangan Permendikbud tentang Pemantauan dan Evaluasi PPKD. Permendikbud tersebut merupakan amanah dari Perpres No. 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan Pasal 22 yang menyatakan bahwa, "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri". Uji Coba yang dilakukan, bertujuan untuk mendapatkan masukan dari Dinas Provinsi sebelum nantinya borang dan instrumen ini menjadi lampiran Permendikbud tentang Pemantauan dan Evaluasi PPKD. Borang pemantauan dan instrumen evaluasi ini diharapkan siap untuk diaplikasikan dan dapat menjawab kebutuhan pemantauan dan evaluasi PPKD di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia.

**Persentase PPKD Yang Dijadikan Rujukan dalam RPJMD dan RKPD**



#### **SK 4. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan**

Pencapaian keberhasilan dari Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Kebudayaan" ini didukung oleh tiga indikator kinerja kegiatan, yaitu:

1. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
2. Jumlah satker yang dibina menuju WBK
3. Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 94

Ketercapaian atas indikator kinerja kegiatan ini dijelaskan sebagai berikut:

#### IKK 4.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
Predikat BB	Predikat BB	100	Predikat A

Dalam Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan laporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. SAKIP merupakan salah satu komponen dalam terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan salah satu dari delapan komponen Reformasi Birokrasi Internal (RBI) yang menjadi penilaian dari Kementerian PAN-RB.

Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN-RB No.12 Tahun 2015 yang didasarkan pada 5 komponen penilaian, yaitu:

No	Komponen	Bobot Penilaian
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	25%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Internal	10%
5	Capaian Kinerja	20%
<b>Total Nilai</b>		<b>100%</b>

Berdasarkan Definisi Operasional Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024, rata-rata predikat SAKIP satker dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap satker di lingkungan unit utama yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Rerata\ SAKIP = \frac{\sum Nilai\ SAKIP_{satker}}{Jumlah\ Satker}$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka rata-rata nilai SAKIP satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan diperoleh:

$$Rerata\ SAKIP = \frac{\sum 2487,19}{35} = 71,06$$

Hasil rata-rata SAKIP tersebut kemudian dikategorikan ke dalam predikat seperti pada tabel berikut.

Kategori Penilaian Hasil Evaluasi ( <i>Scoring</i> )		
Kategori	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
B	>60-70	<b>Baik</b> akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.
C	>30-50	<b>Kurang baik</b> , Sistem dan tatan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja, tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
D	0-30	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk menerapkan manajemen kinerja perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata predikat SAKIP di lingkungan Ditjen Kebudayaan dengan nilai 71,06 mendapat predikat BB sehingga pada tahun 2020 Sekretariat Ditjen Kebudayaan telah berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan dalam renstra dengan capaian 100%.

Perhitungan di atas didasarkan pada 35 satker di bawah pembinaan Sekretariat Ditjen Kebudayaan karena 4 satker lainnya merupakan satker baru, yaitu (1) Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, (2) Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, (3) Direktorat Pelindungan, dan (4) Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru.

Rata-rata predikat SAKIP satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan mendapat predikat nilai BB (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut:

- a. predikat A sebanyak 7 satker/UPT
- b. predikat BB sebanyak 12 satker/UPT
- c. predikat B sebanyak 15 satker/UPT
- d. predikat CC sebanyak 1 satker/UPT
- e. 4 satker lainnya merupakan satker baru

Untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Ditjen Kebudayaan berusaha untuk melakukan pendampingan kepada satker dan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- a. Telaah penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2020 pada aplikasi e-kinerja  
Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) yang biasanya dilakukan pada awal tahun, pada tahun 2020 ini dilakukan pada bulan Juni 2020. Hal ini dikarenakan adanya

perubahan nomenklatur pada beberapa satker di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan dokumen perencanaan negara RENSTRA Kemendikbud yang baru terbit pada bulan Juni 2020. Kegiatan telaah penyusunan PK ini dilakukan pada tanggal 13 Juli 2020. Pada kegiatan ini juga membahas mengenai kendala dan permasalahan serta solusi berkaitan dengan penginputan dan penyusunan PK pada aplikasi e-kinerja.

- b. Sosialisasi dan koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja Individu  
 Sosialisasi penyusunan Perjanjian Kinerja Individu dilakukan pada tanggal 2 September 2020. Penyusunan PK Individu menjadi salah satu penilaian dalam evaluasi SAKIP yang sekaligus dapat meningkatkan nilai SAKIP. Tujuan penyusunan PK Individu ini untuk memastikan keselarasan kinerja sampai ke level individu. Perjanjian Kinerja Individu pada tahun 2020 ini merupakan pelaksanaan untuk pertama kalinya, oleh karena itu diperlukan sosialisasi untuk memberi pemahaman sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Pendampingan pelaksanaan SAKIP terhadap satker/UPT  
 Pendampingan SAKIP ini dilakukan dengan mengunjungi secara langsung satker/UPT yang dianggap masih membutuhkan pembinaan. Pendampingan dilakukan sekaligus dengan melakukan evaluasi dan asistensi penggunaan aplikasi SIMPROKA yang juga berkaitan dengan penginputan hasil capaian kinerja satker/UPT. Pendampingan dilakukan kepada BPNB Kepulauan Riau, BPNB Maluku, BPNB Jawa Barat, BPNB Sulawesi Utara, BPCB Kalimantan Timur, dan BPCB Sulawesi Selatan.

#### IKK 4.2 Jumlah Satker yang dibina menuju WBK

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
10 satker	10 satker	100%	2 satker

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan hasil



penilaian mandiri oleh Tim Penilaian Internal (TPI) Zona Integritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Pembinaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan yang diusulkan untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) antara lain:

1. Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
2. Museum Basoeki Abdullah
3. Balai Konservasi Borobudur
4. Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali
5. Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta
6. Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku
7. Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali
8. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
9. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
10. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan wawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Pemberian predikat WBK dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia.

Dari 10 (sepuluh) satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diusulkan, tiga UPT diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020, yaitu:

1. Museum Benteng Vredeburgh
2. Museum Basoeki Abdullah
3. Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali





### IKK 4.3 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
Nilai 94	94,45	100,48%	95,4

Kinerja anggaran merupakan caipapan kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran diukur dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot tertimbang.

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Dalam Definisi Operasional Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024, rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata NKA} = \frac{\sum \text{Nilai NKA}_{\text{satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

*Ket: NKA merupakan Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L*

Dari rumusan di atas, pada tahun 2020 rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebesar 94,45. Rata-rata nilai ini menunjukkan capaian sebesar 100,48% dari target yang ditetapkan dengan nilai 94. Nilai ini juga melebihi nilai kinerja anggaran tahun sebelumnya, yang mana untuk rata-rata nilai kinerja satker pada tahun 2019 adalah sebesar 93,06.

Perhitungan tersebut didasarkan pada 39 satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan dengan rincian 6 satker mendapatkan nilai kinerja anggaran dibawah 90 dan 33 satker lainnya mendapatkan nilai kinerja anggaran diatas 90. Penghitungan mengesampingkan

nilai dari empat satker yang telah dilikuidasi yaitu Direktorat Kesenian, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Sejarah, dan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya.

Berikut merupakan tabel Nilai Kinerja Satker Ditjen Kebudayaan 2020.

No	Satker	Nilai EKA	Nilai IKPA	Nilai Kinerja
1	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA D.I. YOGYAKARTA	98,98	99,71	99,27
2	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR	99,13	98,33	98,81
3	KANTOR MUSEUM BENTENG VREDEBURG, JOGJAKARTA	98,96	97,28	98,29
4	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SUMATERA BARAT	98,63	97,25	98,21
5	GALERI NASIONAL INDONESIA	98,95	96,51	97,97
6	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAMBI	98,77	96,54	97,88
7	BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN	98,82	95,84	97,63
8	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PAPUA	98,32	97,64	98,05
9	KANTOR MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI, JAKARTA	98,81	94,16	96,95
10	KANTOR MUSEUM SUMPAH PEMUDA, JAKARTA	97,42	96,22	96,94
11	MUSEUM KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA BALAI KIRTI	97,88	95,41	96,89
12	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA KEPULAUAN RIAU	97,40	95,84	96,78
13	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO	95,98	97,73	96,68
14	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TENGAH	95,16	98,53	96,51
15	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA JAWA BARAT	92,36	99,71	95,30
16	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA D.I. YOGYAKARTA	94,50	96,41	95,26
17	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MALUKU UTARA	93,93	96,82	95,09
18	KANTOR MUSEUM BASOEKI ABDULLAH, JAKARTA	96,87	96,22	96,61
19	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR	97,18	91,62	94,96
20	DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN	97,48	93,02	95,70
21	BALAI KONSERVASI BOROBUDUR	91,58	98,47	94,34
22	DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN	97,62	91,12	95,02
23	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BALI	89,91	99,49	93,74
24	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BANTEN	89,89	99,12	93,58
25	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA KALIMANTAN BARAT	90,38	98,36	93,57
26	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI	88,90	100,00	93,34
27	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA SULAWESI SELATAN	89,50	98,92	93,27
28	DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN MASYARAKAT ADAT	95,87	89,78	93,43
29	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN	97,80	87,04	93,50
30	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA SUMATERA BARAT	89,51	94,86	91,65
31	KANTOR MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL, JAKARTA	92,03	89,56	91,83
32	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH	85,14	99,19	90,76
33	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA SULAWESI UTARA	91,21	89,59	90,56
34	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA MALUKU	84,95	99,00	90,57
35	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN	88,11	91,28	89,38
36	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA ACEH	85,81	95,19	89,56
37	KANTOR MUSEUM NASIONAL	90,94	90,96	90,95
38	DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK DAN MEDIA BARU	87,27	86,58	86,99
39	DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN	88,13	87,44	87,85

Meskipun target pada IKK ini telah tercapai, namun masih terdapat permasalahan terkait nilai kinerja anggaran pada tahun 2020. Nilai IKPA tahun 2020 tidak dapat dimaksimalkan lagi pada indikator Penyampaian Data Kontrak (nilai 74) dan Deviasi Halaman III DIPA (nilai 74,12), serta indikator Efisiensi di EKA yang tidak maksimal yaitu hanya sebesar 11,44.

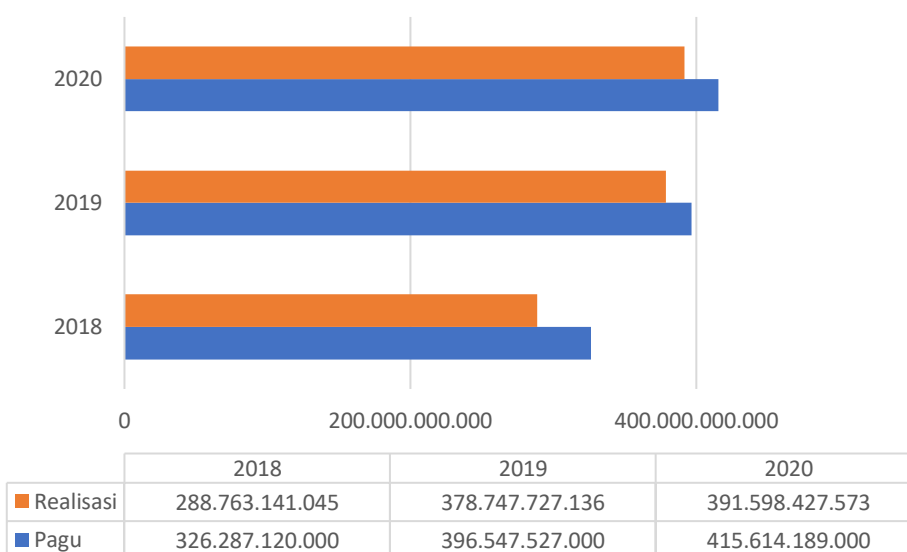
Sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan nilai kinerja anggaran satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan, Sekretariat Ditjen Kebudayaan melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkala (per triwulan) melalui aplikasi SIMPROKA Kemdikbud. Pendampingan secara langsung dengan melakukan visitasi satker yang memerlukan pembinaan juga dilakukan diantaranya kepada BPNB Kepulauan Riau, BPNB Maluku, BPNB Jawa Barat, BPNB Sulawesi Utara, BPCB Kalimantan Timur, dan BPCB Sulawesi Selatan.



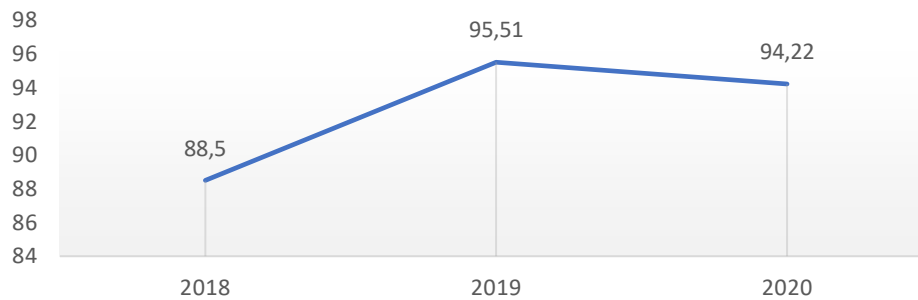
## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam DIPA tahun 2020 sebesar Rp 415.614.189.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp 391.598.427.573 dengan persentase daya serap sebesar 94,22% dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 95,30%. Dibandingkan dengan tahun 2019, persentase realisasi anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar 1,21%. Penurunan dan ketidaktercapaian target realisasi anggaran tersebut disebabkan karena adanya pandemi covid-19 di tahun 2020 yang mengakibatkan perlunya refocusing anggaran sehingga terjadi pengurangan jumlah anggaran dan sasaran.

**Grafik Realisasi Anggaran Setditjen Kebudayaan 2020**



### Tren Realisasi Anggaran Setditjen Kebudayaan



Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian empat sasaran kegiatan dengan tujuh indikator kinerja kegiatan.

IKK	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.1 Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah	Menggunakan APBD		
1.2 Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional	72.783.304.000	63.140.137.322	86,75%
2.1 Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD	888.765.000	850.609.763	95,71%
3.1 Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RPJMD			
4.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	2.881.197.000	2.486.330.404	86,30%
4.2 Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	1.185.975.000	1.025.153.308	86,44%
4.3 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	7.986.589.000	7.807.167.241	97,75%

Adapun rincian realisasi anggaran per jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	B. Pegawai	Rp 146.458.329.000	Rp 146.139.461.982	99,78
2	B. Barang	Rp 251.918.615.000	Rp 229.317.020.963	91,03
3	B. Modal	Rp 17.237.245.000	Rp 16.141.944.628	93,65
<b>Total</b>		<b>Rp 415.614.189.000</b>	<b>Rp 391.598.427.573</b>	<b>94,22</b>

Pada tahun 2020, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 10.875.608.000. Efisiensi tersebut diperoleh dari

pemotongan anggaran Sekretariat Ditjen Kebudayaan khususnya pada kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Kebudayaan termasuk di dalamnya efisiensi pemotongan anggaran untuk penanganan covid-19 berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran APBN Tahun Anggaran 2020. Efisiensi juga diperoleh dari optimalisasi belanja pegawai (Pengurangan Kelebihan Belanja Pegawai karena tidak dibayarkannya Tukin 13 dan 14). Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti:

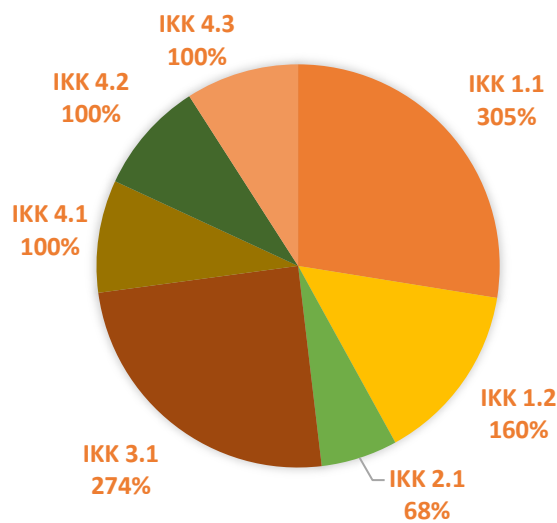
1. Even Prioritas Bidang Kebudayaan Pekan Kebudayaan Nasional dan Pawai Budaya
2. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kebudayaan
3. Penambahan sarana dan prasarana



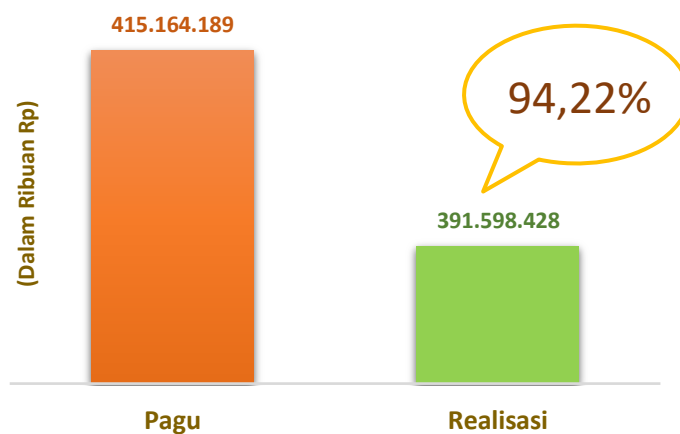
## BAB IV. PENUTUP

Selama tahun 2020, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

### Capaian Indikator Kinerja



### Kinerja Keuangan Setditjenbud



Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

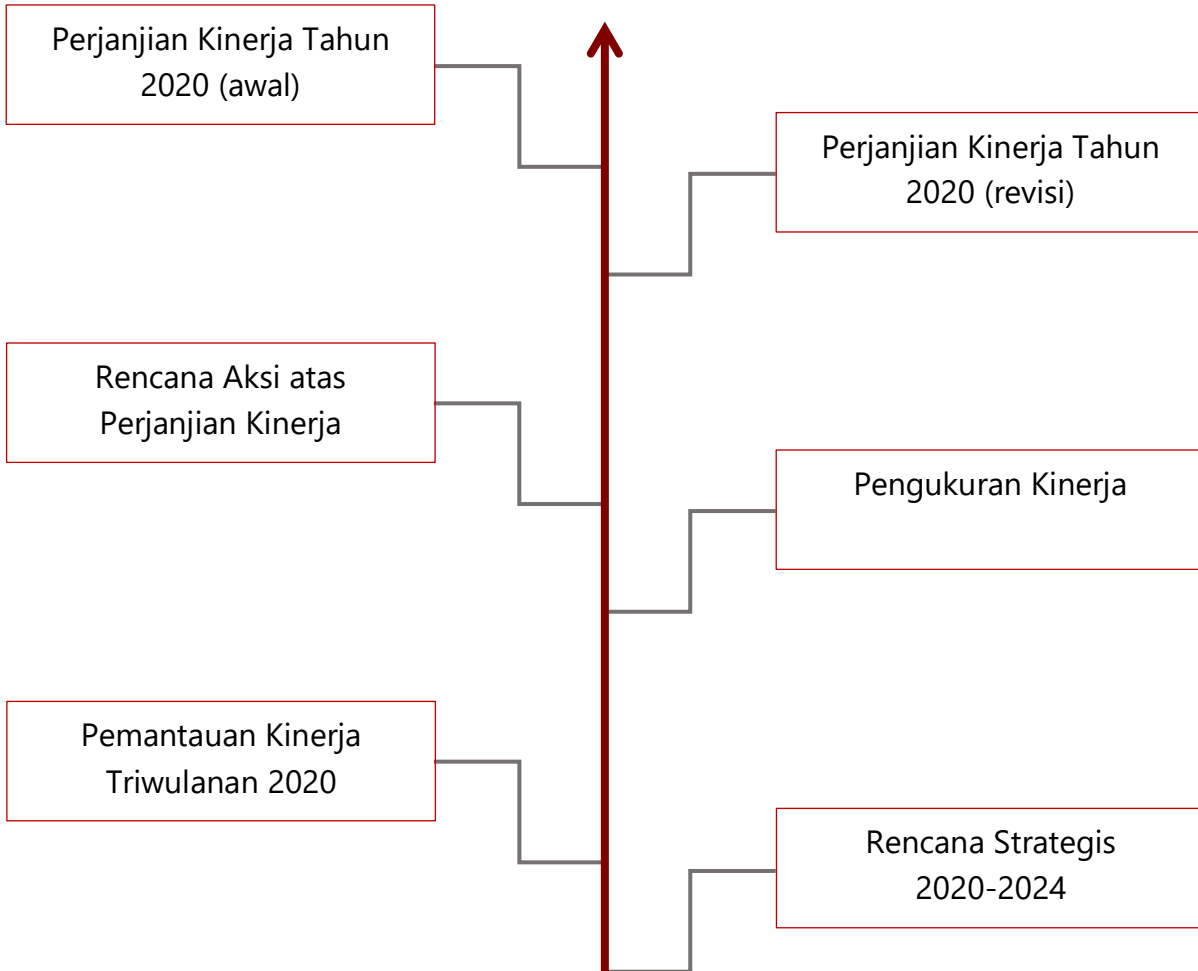
No	Substansi	Identifikasi Masalah	Tindak Lanjut
1	Data	Perbaikan manajemen tata Kelola	Pendampingan dari Setditjen terkait standar pengelolaan data : a. Memperkuat data koleksi b. Pengelolaan database di UPT c. Perbaikan tata kelola pendataan dan penetapan WBTB
		Belum ada SOP pengelolaan data di satker Ditjenbud	Menyusun SOP kegiatan pengelolaan data
		Penguatan kompetensi operator terkait aplikasi	Pendampingan dari Setditjen terkait aplikasi
2	Jalur Rempah	Belum terkoordinasi kegiatan di satker pusat dan UPT	a. Pendampingan dari Setditjen b. Konsolidasi satker pusat dan UPT
3	Desa Pemajuan Kebudayaan	Pedoman dari Kemendes	a. Pengesahan pedoman antara Kemendes dan Ditjen Kebudayaan b. Sosialisasi pedoman Desa Pemajuan Kebudayaan
4	Destinasi Super Prioritas (Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur)	Kurangnya koordinasi antara pusat, daerah, dan Kementerian terkait	Pendampingan pelaksanaan destinasi super prioritas
5	Kegiatan secara daring	Publikasi kurang tepat sasaran	Peningkatan publikasi kegiatan
6	SDM	Pelatihan atau sertifikasi TACB	Perlu sinergi pusat dan daerah dalam pelatihan atau sertifikasi TACB
		Belum adanya tenaga ahli WBTB	Permendikbud tentang TAWBTB
		Peningkatan kompetensi pegawai bidang permuseuman	Bimtek Kompetensi pegawai bidang permuseuman







# LAMPIRAN



## Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (awal)



### Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra. Sri Hartini, M.Si

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal Kebudayaan

(Hilmar Farid, Ph.D)

Jakarta, Juni 2020  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Kebudayaan

(Dra. Sri Hartini, M.Si)



2007140619121

Halaman 1 dari 2

**TARGET KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan	1.1 Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah	event	20,00
		1.2 Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional	pemda	20,00
2	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD	2.1 Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD	kab/kota	50,00
3	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD	3.1 Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD	kab/kota	50,00
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	4.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB
		4.2 Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	10,00
		4.3 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Satker minimal 94	nilai	94,00

**KEGIATAN DAN ANGGARAN**

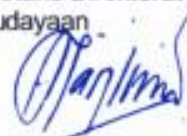
No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	481.320.458.000
<b>TOTAL</b>			<b>481.320.458.000</b>

Direktur Jenderal Kebudayaan



(Hilmar Farid, Ph.D)

Jakarta, Juni 2020  
 Sekretaris Direktorat Jenderal  
 Kebudayaan



(Dra. Sri Hartini, M.Si)



2007140619121

Halaman 2 dari 2

## Lampiran 2: Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (revisi)



### Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitra Arda, M.Hum

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Jakarta, November 2020  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Kebudayaan

Hilmar Farid, Ph.D

Fitra Arda, M.Hum



2012110836354

Halaman 1 dari 2

**TARGET KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan	1.1 Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah	event	20,00
		1.2 Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional	pemda	20,00
2	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD	2.1 Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD	kab/kota	50,00
3	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD	3.1 Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD	kab/kota	50,00
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	4.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB
		4.2 Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	10,00
		4.3 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	nilai	94,00

**KEGIATAN DAN ANGGARAN**

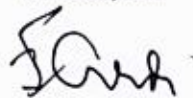
No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	415.614.189.000
<b>TOTAL</b>			<b>415.614.189.000</b>

Direktur Jenderal Kebudayaan



(Hilmar Farid, Ph.D)

Jakarta, November 2020  
 Sekretaris Direktorat Jenderal  
 Kebudayaan



(Fitra Arda, M.Hum)



2012110836354

Halaman 2 dari 2

## Lampiran 3: Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

### RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SETDITJEN KEBUDAYAAN TAHUN 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target							
				Nasional	Satker	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4		
1	Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan	Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah	event	20	20	0	5	15	20		
		Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional	permda	20	20	0	5	15	20		
2	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD	kab/kota	50	50	10	25	40	50		
3	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RPKD dan RJMD	Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RPKD dan RJMD	kab/kota	50	50	10	25	40	50		
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	BB	0	0	0	BB		
		Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	10	10	0	0	0	10		
		Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	nilai	94	94	0	0	0	94		



## Rencana Aksi pada aplikasi e-kinerja

RENCANA AKSI PENCAPAIAN OUTPUT KEGIATAN										
Nomenklatur	No	Kode	Kegiatan / Output	Satuan	Target				Sasaran	
					Satker	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3		Triwulan 4
Kegiatan	1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Digen Kebudayaan							
Output	1.1	5180.001	Even Prioritas Bidang Kebudayaan	Even	3	0	0	2	3	
Output	1.2	5180.002	Fasilitas Pemerintah Bidang Kebudayaan	Fasilitas	200	0	100	200	200	
Output	1.3	5180.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	0	0	0	1	
Output	1.4	5180.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	0	0	0	1	
Output	1.5	5180.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	0	0	1	
RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN										
Nomenklatur	No	Kode	Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target					
					Nasional	Satker	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
Kegiatan	5180		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Digen Kebudayaan							
SK	1	5180.01	Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan							
IKK	1.1	5180.01.01	Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah	event	20	20	0	5	15	20
IKK	1.2	5180.01.02	Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional	pemda	20	20	0	5	15	20
SK	2	5180.02	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbaiki PPKD							
IKK	2.1	5180.02.01	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbaiki PPKD	kab/kota	50	50	10	25	40	50
SK	3	5180.03	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RIMD							
IKK	3.1	5180.03.01	Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RIMD	kab/kota	50	50	10	25	40	50
SK	4	5180.04	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Digen Kebudayaan							
IKK	4.1	5180.04.01	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	BB	0	0	0	BB
IKK	4.2	5180.04.02	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	10	10	0	0	0	10
IKK	4.3	5180.04.03	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	nilai	94	94	0	0	0	94



## Lampiran 4: Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan Daerah	1.3 Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah	20 event	61	305%	Menggunakan APBD		
		1.4 Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional	20 pemda	32	160%	72.783.304.000	63.140.137.322	86,75
2	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD	2.2 Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD	50 Kab/kota	34	68%	888.765.000	850.609.763	95,71
3	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RPJMD	3.2 Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RPJMD	50 Kab/kota	137	274%			
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	4.4 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat BB	Predikat BB	100%	2.881.197.000	2.486.330.404	86,30
		4.5 Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	10 satker	10 satker	100%	1.185.975.000	1.025.153.308	86,44
		4.6 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	Nilai 94	Nilai 94,45	100,48%	7.986.589.000	7.807.167.241	97,75

## Lampiran 5: Pemantauan Kinerja Triwulanan 2020

Nomenklatur	No	Kode	Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Nasional	Target Satker	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Catatan
							Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
Kegiatan	5180		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan												
SK	1	5180.01	Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan [Cascading SP: 12.]		20	20	0	7	5	17	15	47	20	61	<a href="#">Lihat</a>
IKK	1.1	5180.01.01	Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah	event											
IKK	1.2	5180.01.02	Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional	penda	20	20	0	0	5	0	15	25	20	32	<a href="#">Lihat</a>
SK	2	5180.02	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD [Cascading SP: 12.]												
IKK	2.1	5180.02.01	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD	kab/kota	50	50	10	20	25	21	40	21	50	34	<a href="#">Lihat</a>
SK	3	5180.03	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RIMD [Cascading SP: 12.]												
IKK	3.1	5180.03.01	Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RIMD	kab/kota	50	50	10	0	25	0	40	0	50	137	<a href="#">Lihat</a>
SK	4	5180.04	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan [Cascading SP: 12.]												
IKK	4.1	5180.04.01	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	BB	0	0	0	0	0	0	BB	BB	<a href="#">Lihat</a>
IKK	4.2	5180.04.02	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	10	10	0	0	0	0	0	0	10	10	<a href="#">Lihat</a>
IKK	4.3	5180.04.03	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	nilai	94	94	0	0	0	0	0	0	94	92,45	<a href="#">Lihat</a>

## Lampiran 6: Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan			863,11	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
SK	Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan				
IKK	Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah	event	20		
IKK	Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional	pemda	20		
SK	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD				
IKK	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD	kab/kota	50		
SK	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RIMD				
IKK	Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RIMD	kab/kota	50		
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	10		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	nilai	94		



**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**